

PROSPEK BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROPINSI JAWA TIMUR PASCA PAKTO 1988

**Suatu Analisis Pengaruh Peningkatan Jumlah BPR di Jawa Timur
Terhadap Aktiva, Tabungan, Deposito dan Pinjaman**

KARYA TULIS UTAMA

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat Magister Manajemen**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**

KK
Mm 27/94
Moe
p.

Diajukan oleh :

INDRIATMINI NOEGROHO

049210040 - M

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1994**

**PROSPEK
BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI PROPINSI JAWA TIMUR
PASCA PAKTO 1988**

**Suatu Analisis Terhadap Pengaruh
Peningkatan Jumlah BPR di Jawa Timur
Terhadap Aktiva, Tabungan, Deposito dan Pinjaman**

KARYA TULIS UTAMA

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai
Derajat Magister Manajemen**

Diajukan Oleh :

**INDRIATMINI NOEGROHO
NIM. 049210040**

**Telah disetujui Oleh :
Pembimbing**

Drs.Ec. H.A. Choesni Abdulkarim, Msc.

Tanggal : 27-4-99

N I P. 130 517 219

**Mengetahui :
Direktur Program Magister Manajemen**

Drs.Ec. H.A. Choesni Abdulkarim, Msc.

Tanggal : 27-4-99

N I P. 130 517 219

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dari hasil penelitian mengenai prospek BPR di Jawa Timur pasca Pakto 1988, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Kondisi Bank Perkreditan Rakyat setelah Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 menunjukkan gambaran yang masih menyedihkan. Deregulasi 27 Oktober 1988 mempunyai pengaruh terhadap peningkatan jumlah BPR terutama bagi pro-pinsi Jawa Timur. Dengan adanya peningkatan mengindikasikan semakin tegasnya eksistensi BPR di Jawa Timur untuk lebih jauh menjadi figur yang sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Dapatlah disimpulkan bahwa BPR di Jawa Timur hanya berfungsi menghimpun dana masyarakat pedesaan dan menyalurkannya ke sektor perkotaan karena dirasa lebih profitable.
2. Dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, BPR di Jawa Timur tergolong berhasil dalam menghimpun dana. Setelah adanya Pakto 1988 dana dari masyarakat yang berhasil dihimpun BPR di Jawa Timur mengalami peningkatan.

3. Dalam menjalankan usahanya dengan memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, ternyata BPR di Jawa Timur lebih banyak memberikan kreditnya berupa kredit modal kerja sebesar 91%.
4. Dengan meningkatnya jumlah penabung maka dana yang dihimpun BPR semakin meningkat, tetapi peningkatan yang terbesar terpusat pada tabungan daripada Deposito. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nasabah BPR lebih cenderung memilih Tabungan daripada Deposito.
5. Alokasi kredit BPR yang mengalir lebih banyak pada sektor perdagangan, restoran dan hotel yaitu sebesar 70%. Ini berarti BPR di Jawa Timur kurang menyalurkan kreditnya pada sektor pedesaan yang kebanyakan didomisili oleh golongan lemah. Dapat disimpulkan bahwa BPR di Jawa Timur kurang melaksanakan fungsinya secara optimal.
6. Tidak ada perbedaan antara sumber dana dan kredit (pinjaman) pada BPR di Jawa Timur setelah Pakto 1988. Keadaan demikian mencerminkan adanya bobot yang sama antara sumber dana dan kredit (pinjaman)

6.2 Saran-Saran

Akhirnya, untuk melengkapi berbagai kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, rasanya urgens dan responsible bagi penulis untuk ikut memberikan sekapur sirih saran, yaitu sebagai berikut :